



KATALOG BPS. 9205.3174

PENDAPATAN REGIONAL JAKARTA BARAT 2000 - 2003



Kantor Walikota Jakarta Barat

BPS

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTAMADYA JAKARTA BARAT

ISSN 1629-7153





KATALOG BPS: 9205.3174

NO. PUSTAKA :

M F N :

MILIK : PERPUSTAKAAN BPS PROVINSI
DKI JAKARTA

PENDAPATAN REGIONAL JAKARTA BARAT 2000-2003



MILIK

PERPUSTAKAAN
BPS PROVINSI
DKI JAKARTA



Kantor Walikota Jakarta Barat

WILDA:

A R S I P

BPS BADAN PUSAT STATISTIK
KOTAMADYA JAKARTA BARAT

ISSN 1629-7153



0 771829 715345

KATA PENGANTAR

Pendapatan Regional Jakarta Barat, 2000-2003 merupakan publikasi yang secara series diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kotamadya Jakarta Barat. Publikasi ini disajikan menurut Lapangan Usaha yang dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 1993, dan disusun berdasarkan tabel-tabel yang lazim digunakan sebagai indikator ekonomi.

Keterbatasan data dasar yang tersedia menyebabkan beberapa angka sektor/indikator masih bersifat sementara, terutama angka tahun 2003 dan akan disempurnakan pada publikasi berikutnya.

Disadari bahwa hasil penghitungan pendapatan regional yang dilakukan ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, maka upaya perbaikan dan penyempurnaannya akan terus dilakukan. Untuk itu,

saran dan kritik yang sifatnya dapat meningkatkan kualitas penyajian publikasi ini sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2004
Badan Pusat Statistik
Kotamadya Jakarta Barat
Kepala,



DANANG SATRIA, MA
NIP: 340010076

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL ANALISIS	v
LAMPIRAN TABEL POKOK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Penjelasan Umum	1
1.2 Penggunaan Tahun Dasar	4
1.3 Perubahan Klasifikasi	6
1.4 Konsep dan Definisi	7
1.4.1 Output	8
1.4.2 Biaya antara	8
1.4.3 Nilai Tambah Bruto	9
1.4.4 Penghitungan PDRB	9
a. Pendekatan Produksi	10
b. Pendekatan Pendapatan	11
c. Pendekatan Pengeluaran	11
1.4.5 Susunan Agregat Pendapatan Regional	13
a. PDRB Atas Dasar Harga Pasar	13
b. PDRN Atas Dasar Harga Pasar	13
c. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor	14
d. Produk Regional Neto/Pendapatan Regional ..	14
e. Pendapatan Regional Perkapita	16
1.5 Cara Penyajian dan Angka Indeks	16
1.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan	19
1.6.1 Revaluasi	20
1.6.2 Ekstrapolasi	21
1.6.3 Deflasi	22
1.6.4 Deflasi Berganda	22
BAB II URAIAN SEKTORAL	
2.1 Sektor Pertanian	24
2.1.1 Tanaman Bahan Makanan	24
2.1.2 Tanaman Lainnya	25
2.1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya	26
2.1.4 Perikanan	27
2.2 Sektor Industri Pengolahan	28
2.3 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	30

2.3.1 Listrik	30
2.3.2 Gas	31
2.3.3 Air Bersih	31
2.4 Sektor Bangunan	32
2.5 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	33
2.5.1 Perdagangan Besar dan Eceran	33
2.5.2 Hotel	34
2.5.3 Restoran	34
2.6 Sektor Angkutan dan Komunikasi	35
2.6.1 Pengangkutan	35
a. Angkutan Rel	35
b. Angkutan Jalan Raya	36
c. Angkutan Laut	36
d. Angkutan Udara	37
e. Jasa Penunjang Angkutan	37
2.6.2 Komunikasi	38
a. Pos dan Giro	38
b. Telekomunikasi	39
c. Jasa Penunjang Komunikasi	39
2.7 Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	40
2.7.1 Bank	40
2.7.2 LKBB dan Jasa Penunjang Keuangan	41
a. Lembaga Keuangan Bukan Bank	41
b. Jasa Penunjang Keuangan	41
2.7.3 Sewa Bangunan	42
2.7.4 Jasa Perusahaan	43
2.8 Sektor Jasa-jasa	44
2.8.1 Pemerintahan Umum	44
2.8.2 Jasa-jasa Swasta	46
a. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan	46
b. Jasa Hiburan dan Kebudayaan	47
c. Jasa Perorangan dan Rumahtangga	48

BAB III TINJAUAN EKONOMI JAKARTA BARAT

3.1 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral	52
3.2 Kontribusi Sektoral	59
3.3 PDRB Perkapita	64

BAB IV PERBANDINGAN PDRB ANTAR WILAYAH

4.1 Pertumbuhan Ekonomi	66
4.2 Kontribusi PDRB	70
4.3 PDRB Perkapita	74

DAFTAR TABEL ANALISIS

Tabel		Halaman
3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat, 2000-2003	54
3.2	Kontribusi PDRB Jakarta Barat, 2000-2003	60
3.3	PDRB Perkapita Jakarta Barat, 2000-2003	65
4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kotamadya di DKI Jakarta, 2000-2003	69
4.2	Kontribusi PDRB Menurut Kotamadya di DKI Jakarta, 2000-2003	71
4.3	Kontribusi PDRB Sektoral Menurut Kotamadya di DKI Jakarta, 2000-2003	73
4.4	PDRB Perkapita Menurut Kotamadya di DKI Jakarta, 2000-2003	76

LAMPIRAN TABEL POKOK

Tabel	Halaman
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	77
2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha	78
3. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	79
4. Indeks Berantai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha	80
5. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	81
6. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha	82
7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha	83
8. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	84
9. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha	85
10. Agregat Pendapatan dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 1993	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat, 2000-2003	56
2	Distribusi Persentase PDRB Jakarta Barat, 2002	63

<https://jakbarkota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENJELASAN UMUM

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah memerlukan beragam data statistik sebagai bahan masukan untuk menentukan dan mengarahkan sasaran pembangunan agar dapat tercapai dengan baik.

Hasil pembangunan ekonomi yang telah dicapai di masa lalu perlu dilihat dan dinilai manfaat dan implikasinya untuk pembangunan masa kini dan masa datang. Dengan semakin pesat dan meluasnya kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah-daerah, tentu dibutuhkan data statistik yang akurat dan tepat waktu, baik yang bersifat nasional maupun regional, untuk pencapaian hasil yang berdaya dan tepat guna.

Untuk memenuhi kebutuhan data regional, BPS Kotamadya Jakarta Barat telah berupaya melakukan

penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta Barat secara berkala. Dengan demikian diharapkan hasil pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi yang telah dilakukan di Kotamadya Jakarta Barat dapat dievaluasi, dan selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan untuk masa mendatang.

Salah satu manfaat data PDRB adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada suatu periode dan daerah tertentu. Tingkat aktivitas ekonomi tersebut dapat ditunjukkan melalui Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan oleh masing-masing sektor. Jika NTB di sektor tersebut dijumlahkan akan menghasilkan total PDRB. Di lain pihak pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari seri data PDRB atas dasar harga konstan. Sedangkan struktur ekonomi dapat dilihat dari besarnya sumbangan

masing-masing sektor ekonomi terhadap pencapaian PDRB.

Perkembangan PDRB terjadi akibat perubahan harga produksi atau indikator produksi. Hal ini menyebabkan perubahan sumbangan nilai tambah setiap sektor terhadap PDRB. Jika perkembangan setiap sektor tidak proporsional, misalnya beberapa sektor tertentu berkembang lebih cepat dibanding sektor lainnya, maka dalam jangka panjang akan terjadi perubahan sumbangan secara nyata (*significant*) di setiap sektor. Perubahan ini dikenal sebagai perubahan struktur ekonomi. Secara teoritis yang disebut dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi tidak selalu ditandai dengan besarnya peranan suatu sektor dalam perekonomian, tetapi secara riil memang telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi di suatu sektor tertentu yang ditandai dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi yang mendukung sektor bersangkutan. Perubahan struktur ekonomi ini menarik untuk di analisis karena akan mempengaruhi faktor penentu

dalam penilaian prestasi-prestasi ekonomi suatu daerah. Lebih jauh, jika perubahan ini terjadi secara berarti akan dapat merubah arah kebijaksanaan ekonomi di masa depan.

Dari segi pemakaian konsep, definisi, metodologi, cakupan dan sumber datanya, penyusunan pendapatan regional ini tidak dapat dipisahkan dari pendapatan nasional. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelayakan dan konsistensi hasil penghitungan.

1.2 PENGGUNAAN TAHUN DASAR

BPS dalam memperkirakan PDB atas dasar harga konstan telah melakukan penggeseran tahun dasar 1983 ke tahun dasar 1993. Perubahan tahun dasar tersebut dilandasi oleh alasan pokok sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1983 memang tidak realistis karena perubahan status ekonomi yang relatif cepat

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan tahun 1983 menjadi terlalu rendah. Struktur ekonomi tahun 1983 belum tersentuh deregulasi dan debirokratisasi.

- b. Pada dasarnya, pergantian tahun dasar PDB/PDRB merupakan suatu hal yang secara reguler dilakukan oleh semua negara di dunia. Berdasarkan rekomendasi PBB penyusunan dan penghitungan PDB/PDRB-nya didasarkan atas "*The System of National Accounts (SNA)*" untuk menjadi pegangan bagi semua negara anggota.
- c. Tahun 1993 adalah tahun terakhir pelaksanaan PJP I dan menjelang dimulainya PJP II. Karena itu tahun 1993 dapat dijadikan basis atau tolok ukur pembandingan bagi perkembangan ekonomi dalam Repelita VI dan selanjutnya.

Dengan terjadinya perubahan tahun dasar di tingkat nasional, maka seyogyanya di tingkat propinsi dan wilayah juga melakukan perubahan (dari tahun 1983 ke tahun 1993). Keseragaman penggunaan tahun dasar ini (PDRB dan PDB) memungkinkan dilakukannya perbandingan pertumbuhan ekonomi antara nasional dan daerah.

1.3. PERUBAHAN KLASIFIKASI

Dalam penghitungan PDRB seri harga konstan 1993, terjadi perubahan pengelompokan sektor ekonomi. Pada seri konstan 1983 terdapat 11 sektor ekonomi sedangkan pada seri baru menjadi 9 sektor ekonomi. Perubahan klasifikasi ini dilakukan karena dua alasan:

- a. Klasifikasi baru lebih mengacu pada klasifikasi rekomendasi SNA 1993. Klasifikasi ini bersifat lebih umum dan bermanfaat untuk membandingkan data-data PDB negara lain, baik secara total maupun sektoral.

- b. Klasifikasi baru pada umumnya lebih rinci dengan maksud lebih berorientasi pada pengguna data. Data yang rinci akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan data yang kurang rinci.

Perubahan terjadi pada sektor sewa rumah dan sektor pemerintahan dan pertahanan. sektor sewa rumah dikelompokkan ke dalam sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sebelumnya sub sektor jasa perusahaan dikelompokkan ke dalam sektor jasa-jasa. sementara itu sektor pemerintahan dan pertahanan yang tadinya merupakan sektor tersendiri dikelompokkan ke dalam sektor jasa-jasa dan dimasukkan ke dalam sub sektor pemerintahan umum.

1.4. KONSEP DAN DEFINISI

Berikut ini dijelaskan istilah yang berhubungan dengan PDRB antara lain output, biaya antara dan nilai tambah bruto. Kejelasan pengertian dari tiga istilah tersebut sangat penting untuk memahami apa yang

dimaksud dengan PDRB. Selain hal tersebut, pada bab ini juga dijelaskan mengenai pendekatan penghitungan PDRB, serta susunan agregat pendapatan regional.

1.4.1 OUTPUT

Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Pada dasarnya nilai output diperoleh dari perkalian antara kuantum produksi dan harganya.

1.4.2 BIAYA ANTARA

Biaya antara terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi domestik pada rentang waktu tertentu (biasanya satu tahun).

1.4.3 NILAI TAMBAH BRUTO

Nilai Tambah Bruto merupakan selisih antara nilai output dengan biaya antaranya atau apabila dirumuskan menjadi: Nilai Tambah Bruto = Output - Biaya Antara. Pengertian konsep nilai tambah bruto sangat penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDRB, yang tidak lain adalah penjumlahan dari seluruh besaran nilai tambah bruto dan seluruh unit produksi yang berada pada region tertentu, dalam rentang waktu tertentu.

1.4.4 PENGHITUNGAN PDRB

Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, yang akan dijelaskan berikut ini.

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalan
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel, Restoran
7. Angkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:

1. Pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung;
2. Konsumsi pemerintah;
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto;
4. Perubahan stok;
5. Ekspor neto dihitung dari ekspor dikurangi impor.

Dari tiga pendekatan penghitungan tersebut secara konsep seyogyanya jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya produk domestik regional bruto yang telah diuraikan di atas disebut sebagai produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar, karena mencakup komponen pajak tak langsung neto.

1.4.5 SUSUNAN AGREGAT PENDAPATAN REGIONAL

**a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Pasar**

PDRB Atas Dasar Harga Pasar merupakan penjumlahan dari seluruh besaran nilai tambah bruto dari seluruh unit produksi yang berada pada region tertentu, dalam rentang waktu tertentu.

**b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas
Dasar Harga Pasar**

Perbedaan konsep neto di sini dan konsep bruto pada rincian (a) adalah karena faktor penyusutan. Dalam PDRN atas dasar harga pasar, komponen penyusutan telah dikeluarkan.

c. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar pada rincian (b) adalah karena faktor pajak tidak langsung neto. Dalam PDRN atas dasar biaya faktor, pajak tidak langsung neto telah dikeluarkan.

d. Produk Regional Neto/Pendapatan Regional

Perbedaan dengan konsep pada rincian (c) di atas adalah masalah domestiknya. Disebut produk domestik regional karena nilai tambah yang dihitung adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain. Sedangkan pada rincian (d), produk regional neto merupakan nilai tambah dari faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut, baik

beroperasi di dalam wilayah maupun beroperasi di luar wilayah bersangkutan. Oleh karena itu untuk sampai kepada produk regional neto, pendapatan atas faktor produksi milik penduduk wilayah lain harus dikeluarkan dan sebaliknya pendapatan atas faktor produksi milik penduduk wilayah bersangkutan yang berasal dari luar wilayah harus dimasukkan, dimana selisihnya disebut sebagai faktor pendapatan neto dari luar wilayah. Jadi Produk regional neto/pendapatan regional merupakan produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor ditambah faktor pendapatan neto dari luar wilayah. Pengertian inilah yang sebenarnya merupakan pendapatan regional. Namun demikian karena keterbatasan data penghitungan sampai tingkat ini pada level propinsi atau kabupaten/kotamadya belum sepenuhnya dapat dilakukan.

e. Pendapatan Regional Perkapita

Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka hasilnya merupakan pendapatan regional perkapita.

1.5 CARA PENYAJIAN DAN ANGKA INDEKS

PDRB, seperti yang telah diuraikan, secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, yang dapat dijelaskan berikut ini:

- a. Pada penyajian atas dasar harga berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto.

b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar (dalam publikasi ini harga konstan didasarkan kepada harga pada tahun 1993). Karena menggunakan harga tetap, maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga. PDRB juga disajikan dalam bentuk peranan sektoral dan angka-angka indeks, yaitu: indeks perkembangan; indeks berantai; dan indeks harga implisit yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- *Peranan Sektoral* diperoleh dengan cara membagi nilai masing-masing sektor dengan nilai total seluruh sektor PDRB dikalikan 100 pada tahun yang bersangkutan (baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1993). Dalam penyajiannya, peranan sektor

diberi judul: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto.

- *Indeks Perkembangan* diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat dari tahun ke tahun terhadap tahun dasar.
- *Indeks Berantai* diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya. Apabila angka ini dikalikan dengan angka 100 dan hasilnya dikurangi 100 maka angka ini menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat produksi untuk masing-masing tahun. Metode penghitungan ini dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan sektoral.

- *Indeks Harga Implisit* diperoleh dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahun dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks harga implisit ini dihitung indeks berantainya (dengan rumus indeks berantai), akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya. Indeks ini secara berkala juga dapat menunjukkan besaran inflasi yang mencakup seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah penghitungan PDRB.

1.6 PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN

Angka-angka pendapatan regional atas dasar harga konstan 1993 sangat penting untuk melihat perkembangan riil dari tahun ke tahun bagi setiap

agregat ekonomi yang diamati. Agregat tersebut dapat merupakan produk domestik regional bruto secara keseluruhan, nilai tambah sektoral (PDRB sektoral) ataupun komponen penggunaan produk domestik regional bruto. Pada dasarnya di kenal empat cara untuk memperoleh nilai tambah sektoral atas dasar harga konstan. Masing-masing cara tersebut diuraikan berikut ini.

1.6.1 Revaluasi

Dilakukan dengan cara menilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar 1993 dan hasilnya merupakan output dan biaya antara atas dasar harga konstan 1993. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil penghitungan di atas.

Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya yang digunakan, karena mencakup

komponen yang terlalu banyak di samping data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan 1993 biasanya di peroleh dari perkalian output atas dasar harga konstan 1993 masing-masing tahun dengan ratio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.

1.6.2 Ekstrapolasi

Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 1993 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan atau indeks dari berbagai indikator produksi, jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap penghitungan output atas dasar harga konstan, kemudian dengan menggunakan ratio tetap nilai

tambah atas dasar harga konstan yang sama. Ratio tersebut diperoleh dari survei khusus (SKPR).

1.6.3 Deflasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan Indeks Harga Konsumen atau Indeks Harga Perdagangan Besar.

1.6.4 Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan Indeks Harga Produsen atau Indeks Harga Perdagangan Besar sesuai dengan cakupan komoditinya.

Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, di samping karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan 1993, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

<https://jakbarkota.bps.go.id>

BAB II

URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan pada bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub sektor, cara-cara perhitungan nilai tambah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 1993, serta sumber datanya.

2.1 SEKTOR PERTANIAN

Kegiatan pertanian di Jakarta Barat mencakup usaha tanaman bahan makanan dan tanaman hias, usaha pemeliharaan ternak serta usaha pemeliharaan ikan, dan penangkapan ikan. Kegiatan pertanian lainnya seperti penanaman tanaman perdagangan dan kehutanan tidak terdapat di Jakarta Barat.

2.1.1 Tanaman Bahan Makanan

Subsektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela

rambat, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Data produksi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian, sedangkan data mengenai harga seluruhnya bersumber dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya, kemudian hasilnya di kurangi dengan biaya antara atas dasar harga berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan produksi pada tahun bersangkutan dengan harga pada tahun 1993, kemudian dikurangi lagi dengan biaya antara atas dasar harga konstan 1993.

2.1.2 Tanaman Lainnya

Subsektor ini mencakup kegiatan bercocok tanam dan pengolahan tanah lainnya untuk menghasilkan jenis tanaman yang biasa digunakan sebagai tanaman hias

baik di dalam pot atau lainnya maupun langsung ditanam di pekarangan atau halaman. Jenis komoditinya mencakup antara lain tanaman anggrek dan bunga anggreknya, berbagai tanaman bunga serta tanaman hias lainnya.

Data produksi diperoleh dari Suku Dinas Pertanian Jakarta Barat, sedangkan data harga berupa harga perdagangan besar diperoleh dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan konstan 1993 dihitung dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada tanaman bahan makanan.

2.1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya

Subsektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak, seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, telur, susu segar serta hasil pematangan hewan. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong ditambah perubahan stock populasi ternak dan ekspor ternak netto.

Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, produksi susu dan telur diperoleh dari Dinas Peternakan Jakarta Barat. Sedangkan data mengenai harga ternak diperoleh dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan harga konstan 1993 dihitung dengan cara mengalikan nilai produksi dengan rasio nilai tambah berdasarkan Tabel Input-Output DKI Jakarta.

2.1.4 Perikanan

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah dan karamba.

Data mengenai produksi diperoleh dari Suku Dinas Perikanan Jakarta Barat, sedangkan data mengenai harga diperoleh dari BPS.

Perhitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan konstan 1993 dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sub sektor peternakan.

2.2 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Berbeda dengan seri tahun dasar 1983 yang merinci sektor industri pengolahan ke dalam dua subsektor, yaitu industri besar/ sedang dan industri kecil/ rumahtangga, maka pada seri tahun dasar 1993, pengelompokan didasarkan pada jenis produksi barang yang dihasilkan yang meliputi industri migas dan industri tanpa migas. Namun karena industri migas tidak terdapat di Jakarta, maka pembahasan hanya dibatasi pada industri tanpa migas.

Subsektor industri tanpa migas mencakup industri makanan, minuman & tembakau; Industri tekstil, barang dari kulit & alas kaki; Industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; Industri kertas dan barang cetakan; Industri pupuk, kimia dan barang dari karet; Industri semen dan barang galian bukan logam; Industri logam dasar besi dan baja; Industri alat angkutan, mesin dan peralatannya; serta industri barang lainnya yang belum tercakup.

Data mengenai indikator produksi diperoleh melalui Survei Tahunan Industri Besar/Sedang, Survei triwulanan Industri Besar/Sedang, Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga serta dari dinas-dinas terkait. Penghitungan output atas dasar harga berlaku untuk kelompok industri besar/sedang digunakan pendekatan produksi, yaitu output dihitung lebih dahulu, kemudian output dikurangi biaya antara diperoleh nilai tambah brutonya, sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 1993 menggunakan metode deflasi dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) barang-barang industri sebagai deflator.

Output atas dasar harga berlaku untuk kelompok industri kecil dihitung dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada kelompok Industri Besar/Sedang, sedangkan atas dasar harga konstan 1993 dihitung berdasarkan metode ekstrapolasi dengan indeks produksi sebagai ekstrapolatornya.

2.3 SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

Data produksi yang disajikan dalam publikasi ini adalah data dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Negara Gas (PN Gas) dan Perusahaan Air Minum.

Output masing-masing subsektor mencakup semua produksi yang di hasilkan dari berbagai kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan definisinya.

2.3.1 Listrik

Subsektor ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi listrik yang diusahakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Data produksi, harga dan biaya antara subsektor ini di peroleh dari Survei Tahunan Perusahaan Umum Listrik Negara.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi. Sedangkan Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi, di mana Indeks Tarif per Kwh digunakan sebagai deflator.

2.3.2 G a s

Yang dicakup dalam subsektor ini adalah produksi gas dari perusahaan umum gas negara (PN Gas). Data produksi, harga dan biaya-biaya yang digunakan diperoleh dari Survei Tahunan Perusahaan Umum Gas Negara.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi, dimana indeks tarif digunakan sebagai deflator.

2.3.3 Air Bersih

Subsektor ini mencakup air bersih yang diusahakan oleh Perusahaan Air Minum. Data produksi, harga dan biaya-biaya yang digunakan diperoleh dari Survei Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi. Sedangkan nilai

tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi, dimana indeks tarif digunakan sebagai deflator.

2.4 SEKTOR BANGUNAN

Sektor bangunan mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan maupun jaringan listrik, gas, air, telepon dan sebagainya. Output sektor bangunan diperoleh dari publikasi Statistik Bangunan/Konstruksi dan pengolahan hasil Susenas 1993. Sedangkan untuk memperoleh nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara mengalikan output dengan rasio nilai tambah berdasarkan hasil Survei Tahunan Konstruksi.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi, dimana IHPB barang-barang konstruksi digunakan sebagai deflator.

2.5 SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

2.5.1 Perdagangan Besar dan Eceran

Output perdagangan merupakan jumlah margin perdagangan yang timbul dari seluruh komoditi yang diperdagangkan, sedangkan margin perdagangan itu sendiri merupakan selisih antara nilai jual dengan nilai pembelian setelah dikurangi dengan biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang.

Output atas dasar harga berlaku diperkirakan berdasarkan jumlah tenaga kerja dikalikan dengan rata-rata output per tenaga kerja. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku di peroleh dengan cara mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Survei Khusus Perdagangan dan Jasa 1996.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi dengan Indeks Harga Perdagangan Besar sebagai deflator.

2.5.2 Hotel

Subsektor ini mencakup semua hotel, baik berbintang maupun tidak berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya.

Output dihitung dengan cara mengalikan jumlah kamar dengan output per kamar. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Survei Khusus Pendapatan Regional 1996. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi dengan indeks harga konsumen sebagai deflator.

2.5.3 Restoran

Subsektor ini mencakup kegiatan penyediaan dan penjualan makanan dan minuman jadi. Output diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara

mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Tabel Input-Output DKI Jakarta.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi dengan Indeks Harga Konsumen kelompok makanan sebagai deflator.

2.6 SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, sungai/danau ataupun udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

2.6.1 Pengangkutan

a. Angkutan Rel

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan

menggunakan indeks produksi banyak-nya penumpang dan barang yang diangkut.

b. Angkutan Jalan Raya

Subsektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor ataupun tidak bermotor, seperti bis, truk, bemo, taksi, becak dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang yang diperoleh dari Dinas Lalulintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR).

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi masing-masing jenis angkutan jalan raya.

c. Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran milik

nasional baik yang melakukan trayek dalam negeri maupun internasional. Karena kegiatan angkutan laut tidak terdapat di daerah ini, maka nilai tambah yang dihasilkan tidak ada.

d. Angkutan Udara

Mencakup kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan milik nasional, baik penerbangan dalam negeri maupun internasional.

Karena kegiatan angkutan udara tidak terdapat di daerah ini, maka nilai tambah yang dihasilkan tidak ada.

e. Jasa Penunjang Angkutan

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar muat, penyimpanan dan pergudangan serta jasa penunjang lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan perkalian masing-masing unit produksi dengan rata-rata tarifnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan rasio nilai tambah dengan output. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks masing-masing unit produksi.

2.6.2 Komunikasi

Kegiatan yang dicakup adalah jasa pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi.

a. Pos dan Giro

Meliputi kegiatan pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku di dasarkan pada data produksi yang diperoleh dari Perusahaan Umum Pos dan Giro, sedangkan

struktur biaya didasarkan pada Tabel Input Output DKI Jakarta.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi, menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim, barang yang dipaketkan dan sebagainya.

b. Telekomunikasi

Mencakup kegiatan pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan telepon, telegraf dan teleks. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Telkom dan PT. Indosat.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi dengan IHK umum sebagai deflator.

c. Jasa Penunjang Komunikasi

Mencakup kegiatan wartel/warpostel/warparpostel, radio panggil dan telepon seluler. Output diperoleh dari perkalian antara indikator produksi masing-masing kegiatan

dengan output per indikatornya. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah bruto.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung secara ekstrapolasi dengan indikator produksi masing-masing kegiatan sebagai ekstrapolator.

2.7 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

Sektor ini meliputi kegiatan bank, lembaga keuangan tanpa bank, sewa bangunan serta jasa perusahaan.

2.7.1 B a n k

Nilai tambah bruto subsektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi menggunakan angka indeks harga konsumen umum sebagai deflatornya.

2.7.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Jasa Penunjang Keuangan

a. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Mencakup kegiatan asuransi, koperasi, lembaga pembiayaan, pegadaian dan dana pensiun. Penghitungan output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalokasikan output nasional berdasarkan peranan kegiatan LKBB di Jakarta. Demikian juga untuk biaya antara dan nilai tambahnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara deflasi dengan Indeks Harga Konsumen Umum sebagai deflator.

b. Jasa Penunjang Keuangan

Mencakup kegiatan perdagangan valuta asing, Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Paralel Indonesia (BPI), Bursa Komoditi, pialang, pedagang efek, penjamin emisi, wali amanat dan penanggung.

Output pedagang valuta asing diperoleh dari perkalian antara indikator produksi dengan output per indikator, sedangkan untuk kegiatan BEJ, BPI

dan Bursa Komoditi diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Kegiatan lain, seperti pialang, pedagang efek dan sebagainya diperoleh dengan mengalokasikan output nasional berdasarkan kegiatannya di Jakarta.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah bruto. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara deflasi menggunakan indeks harga saham gabungan untuk kegiatan bursa dan indeks harga konsumen untuk kegiatan lainnya.

2.7.3 Sewa Bangunan

Mencakup usaha persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan serta usaha persewaan tanah persil.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak

rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Sensus Penduduk (SP). Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per meter persegi.

Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio nilai tambah bruto dengan outputnya. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara deflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen Tempat Tinggal.

2.7.4 Jasa Perusahaan

Mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokat dan notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa

bangunan/arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran, serta jasa persewaan mesin dan peralatan.

Output jasa perusahaan diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio nilai tambah bruto dengan outputnya. Selanjutnya perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan jumlah tenaga kerja sebagai ekstrapolatornya.

2.8 SEKTOR JASA-JASA

Mencakup jasa pemerintahan umum dan pertahanan serta jasa swasta yang meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga.

2.8.1 Pemerintahan Umum

Cakupan subsektor ini meliputi administrasi pemerintahan umum dan pertahanan serta jasa

pemerintahan lainnya. Subsektor pemerintahan umum dan pertahanan mencakup semua departemen dan non departemen, badan/lembaga tinggi negara, kantor-kantor pemerintah pusat dan daerah serta badan-badan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan, termasuk juga kegiatan yang bersifat jasa seperti sekolah-sekolah pemerintah, universitas negeri, rumah sakit pemerintah, museum dan perpustakaan milik pemerintah dan sebagainya.

Nilai Tambah Bruto sektor pemerintahan umum terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah, perkiraan komponen upah dari belanja pembangunan ditambah dengan perkiraan penyusutan sebesar 5 persen. Data yang dipakai adalah data belanja pegawai pusat dan daerah, data belanja Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II (K1 dan K2) dan data belanja kelurahan (K3).

Data belanja pegawai pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tingkat I (K1) digunakan untuk

mengalokasikan belanja pegawai pusat dan daerah Tingkat I yang dipekerjakan atau diperbantukan di wilayah Jakarta Barat dengan jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah Tingkat I sebagai alokatornya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sebagai ekstrapolatornya .

2.8.2 Jasa-jasa Swasta

a. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan

Mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa kemasyarakatan lainnya, seperti jasa penelitian, rumah sakit, dokter praktek, panti asuhan, panti wredha, yayasan pemeliharaan anak cacat dan sebagainya, terbatas yang dikelola oleh swasta saja. Adapun kegiatan-kegiatan sejenis yang dikelola oleh pemerintah termasuk dalam sektor pemerintahan.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian antara jumlah murid

menurut tingkatan, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter, jumlah anak yang diasuh, jumlah orang tua yang dirawat dan sebagainya dengan rata-rata outputnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan rasio nilai tambah terhadap output yang bersumber dari hasil Survei Khusus Jasa-jasa DKI Jakarta tahun 1996. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan perkembangan masing-masing indikator produksi sebagai ekstrapolatornya.

b. Jasa Hiburan dan Kebudayaan

Meliputi kegiatan produksi dan distribusi film, reproduksi film video, jasa bioskop dan panggung hiburan, perpustakaan, museum, gedung olah raga, kolam renang, klub malam, taman hiburan, lapangan golf, lapangan tenis, bilyard, klub olah raga, artis film, artis panggung, pub, bar, karaoke, video klip, studio televisi dan stasiun pemancar radio yang dikelola oleh swasta.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output bioskop di peroleh dari hasil perkalian antara jumlah penonton dengan rata-rata output per penonton. Sedangkan output jasa hiburan dan rekreasi lainnya diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja.

Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian output dengan rasio nilai tambah yang bersumber dari Survei Khusus Jasa-jasa DKI Jakarta tahun 1996. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks indikator produksi masing-masing kegiatan.

c. Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Meliputi segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumahtangga,

yang terdiri dari jasa perbengkelan/repairasi, jasa pembantu rumahtangga dan jasa perorangan lainnya, seperti tukang binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang semir sepatu dan sejenisnya. Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perbengkelan serta jasa perorangan dan rumahtangga lainnya diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenagakerja dengan rata-rata output per tenaga kerja masing-masing kegiatan.

Sedangkan output jasa pembantu rumahtangga, pengasuh bayi dan sejenisnya diperoleh dari perkalian antara pengeluaran per kapita untuk pembantu rumahtangga dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara output dengan rasio nilai tambah bruto yang bersumber dari Survei Khusus Jasa-jasa DKI Jakarta tahun 1996.

Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 1993 diperoleh dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks indikator produksi masing-masing kegiatan.

<https://jakbarkota.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN EKONOMI JAKARTA BARAT

Menurunnya suhu politik di Indonesia umumnya dan didukung dengan makin stabilnya ekonomi makro, yang ditandai dengan menurunnya inflasi dan suku bunga serta pengaturan kembali pembiayaan pemerintah, berdampak positif bagi kenaikan investasi. Terlihat jelas kegiatan perekonomian nasional dan regional pada berbagai sektor ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia kembali bergairah.

Di Jakarta Barat, membaiknya laju pertumbuhan ekonomi telah terjadi sejak tahun 1999, ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang positif setelah tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan yang negatif (kontraksi ekonomi). Pada tahun 2000, saat kondisi ekonomi mulai mengalami perbaikan, laju pertumbuhan ekonomi meningkat pesat sebesar 4,13 persen. Pada tahun 2001, walaupun pertumbuhan ekonomi Jakarta

Barat meningkat namun tidak setinggi tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,92 persen.

Tahun ini adalah awal dari semakin cepatnya laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Barat, karena sejak tahun ini laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Barat selalu mengalami peningkatan sampai tahun 2003

Tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Barat adalah 3,97 persen, kemudian meningkat menjadi 4,37 persen pada tahun 2003, angka yang tertinggi selama empat tahun terakhir.

Berikut ini akan disajikan kinerja perekonomian Jakarta Barat ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi dan peranan nilai tambah bruto sektoral dan perkembangan PDRB perkapita.

3.1. PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL

Membbaiknya perekonomian Jakarta Barat didukung oleh membaiknya kegiatan produksi di seluruh sektor ekonomi. Tabel 3.1 menyajikan laju

pertumbuhan dari seluruh sektor ekonomi di Jakarta Barat sejak tahun 2000.

Setelah tumbuh pesat sebesar 10,19 persen pada tahun 2001, sektor pertanian di Jakarta Barat mengalami kontraksi sebesar 0,10 persen pada tahun 2002. Tahun 2003 nilai kontraksi ini semakin tajam sebesar 3,21 persen. Hal ini karena terjadi penurunan laju pertumbuhan untuk subsektor tanaman bahan makanan dan peternakan.

Sementara itu, Sektor Industri Pengolahan di Jakarta Barat masih mengalami peningkatan produksi yang cukup berarti walaupun terjadi sedikit fluktuasi pada laju pertumbuhannya sepanjang periode 2000-2003. Tahun 2000 adalah saat laju pertumbuhan ini mencapai titik tertinggi, yaitu 5,49 persen. Walaupun pada tahun 2001 mengalami penurunan menjadi 4,29 persen, namun kembali meningkat menjadi 4,56 persen tahun 2002 dan akhirnya menjadi 4,24 persen pada tahun 2003.

Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih masih menunjukkan laju pertumbuhan yang meningkat. Sejalan dengan semakin banyaknya jumlah penduduk, permintaan akan sektor ini tumbuh secara signifikan. Pertumbuhan sektor ini sempat mengalami pertumbuhan yang sangat tajam pada tahun 2000 sebesar 6,97 persen, tetapi kemudian pertumbuhannya melambat pada tahun 2001 menjadi 5,10 persen. Selanjutnya tumbuh sebesar 5,45 persen pada tahun 2002 dan tumbuh lagi pada tahun 2003 menjadi 5,95 persen.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat, 2000-2003

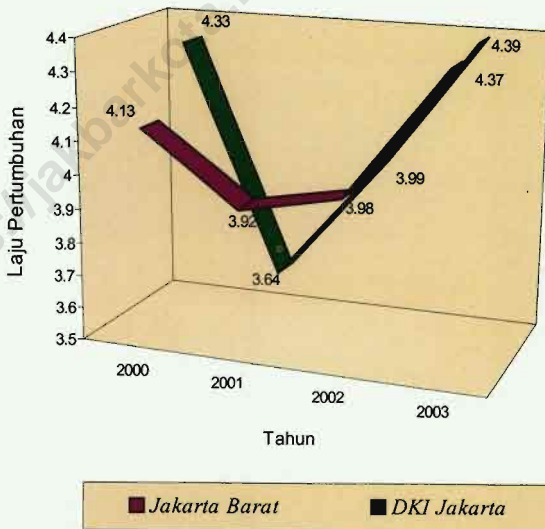
Sektor	2000	2001	2002	2003
Pertanian	-3,46	10,19	-0.10	-3,21
Industri Pengolahan	5,49	4,29	4.56	4,24
Listrik, Gas dan Air Bersih	6,97	5,10	5,45	5,95
Bangunan	3,12	2,29	2.60	2,66
Perdagangan, Hotel Dan restoran	5,06	3,36	3,75	5,32
Pengangkutan dan Komunikasi	5,74	6,36	5.81	5,90
Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,77	4,44	4.37	3,38
Jasa-jasa	3,44	3,65	3.20	4,10
Jakarta Barat	4,13	3,92	3,98	4,37

Sektor bangunan yang sempat mengalami pertumbuhan yang lumayan tinggi sebesar 3,12 persen tahun 2000 sedikit mengalami penurunan sebesar 2,29 persen pada tahun 2001, namun meningkat lagi pada tahun 2002 sebesar 2,60 persen pada tahun 2002 dan meningkat kembali tahun 2003 sebesar 2,66 persen. Bangkitnya sektor bangunan ditandai dengan dimulai kembali pembangunan fisik yang pelaksanaannya sempat ditangguhkan karena adanya krisis yang berkepanjangan. Demikian juga didorong oleh penurunan suku bunga bank, sehingga permintaan akan properti kembali meningkat. Prospek sektor ini diharapkan akan cerah, terutama dengan adanya berbagai proyek baru dalam pembangunan infrastruktur di berbagai sektor ekonomi.

Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang dan jasa tumbuh makin cepat pada tahun 2003 menjadi sebesar 5,32 persen, setelah mencatat pertumbuhan sebesar 3,75 persen pada tahun 2002, 3,36 persen tahun 2001, dan 5,06 persen

pada tahun 2000. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Selain itu minat berbelanja juga semakin meningkat dipengaruhi oleh semakin banyaknya variasi barang yang diperdagangkan dengan makin maraknya barang-barang impor yang lebih murah.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat, 2000-2003



Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang merupakan pendorong aktivitas ekonomi tumbuh sedikit lebih cepat pada tahun 2003 sebesar 5,90 persen dibandingkan dengan tahun 2002 (5,87 persen). Namun angka ini masih lebih rendah dibanding tahun 2001 yang sebesar 6,36 persen. Hal ini terutama karena berkurangnya produksi subsektor angkutan rel yang ditinjau dari menurunnya jumlah penumpang dan barang yang diangkut, sebagai konsekuensi dari perang tarif dengan subsektor angkutan udara yang dimiliki oleh wilayah lain. Namun subsektor komunikasi masih tumbuh pesat seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan semakin membudayanya telepon seluler sebagai alat komunikasi masyarakat.

Seiring dengan itu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2003 tumbuh sedikit lebih lambat, yaitu 3,38 persen dibanding tahun 2002 yang tumbuh 4,37 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan subsektor bank dari 6,14 persen di tahun 2002 menjadi 1,64 persen di tahun 2003. Walaupun demikian terjadi peningkatan

pertumbuhan untuk subsektor lembaga keuangan bukan bank dan sewa bangunan.

Laju pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa mengalami sedikit fluktuasi selama periode 2000-2003. Setelah mencatat pertumbuhan sebesar 3,44 persen pada tahun 2000, kemudian meningkat menjadi 3,65 persen pada tahun 2001. walaupun menurun pada tahun 2002 menjadi 3,20 persen, namun pada tahun 2003 meningkat cukup tajam menjadi 4,10 persen. Penyebab utama adalah peningkatan laju pertumbuhan subsektor pemerintahan umum, yang terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pegawai negeri sipil karena alokasi dari instansi pusat yang dilebur menjadi bagian dari pemerintah daerah. Selain itu subsektor jasa swasta juga mengalami peningkatan di tahun 2003. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan output jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumahtangga.

3.2 KONTRIBUSI SEKTORAL

Adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi sektoral seperti yang disajikan sebelumnya, telah menyebabkan sedikit pergeseran pada struktur ekonomi Jakarta Barat. Misalnya, peranan sektor pengangkutan dan komunikasi sejak tahun 2002 sudah melampaui peranan sektor industri pengolahan, padahal pada tahun 2001 masih terjadi sebaliknya. Namun demikian sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dan Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan masih merupakan sektor yang dominan, karena hampir 50 persen (48,66%) PDRB Jakarta Barat diciptakan oleh kedua sektor tersebut.

Peranan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran telah mengalami sedikit penurunan sejak tahun 2000, dari 27,30 persen menjadi 27,44 persen pada tahun 2001. Walaupun pada tahun 2002, peranan sektor ini menurun menjadi 26,84 persen, namun peranan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran meningkat dari 26,84 persen tahun 2002 menjadi 27,84 persen tahun 2003. Walau demikian, peranan sektor ini dalam

pembentukan PDRB Jakarta Barat masih yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain.

Tabel 3.2 Kontribusi PDRB Jakarta Barat, 2000-2003

Sektor	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian	0,19	0,19	0,18	0,17
2. Industri Pengolahan	11,95	10,91	10,45	9,97
3. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,88	2,12	2,37	2,43
4. Bangunan	15,81	15,99	16,04	15,53
5. Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,30	27,44	26,84	27,84
6. Pengangkutan dan Komunikasi	8,90	10,16	10,99	11,54
7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	21,71	21,06	21,16	20,82
8. Jasa-jasa	12,26	12,13	11,96	11,71
Sektor	100,00	100,00	100,00	100,00

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan besaran peranannya menduduki peringkat kedua dalam pembentukan PDRB Jakarta Barat. Selama periode

2000-2002, peranan sektor ini masih diatas 21 persen, namun pada tahun 2003, peranannya menurun menjadi 20,82 persen.

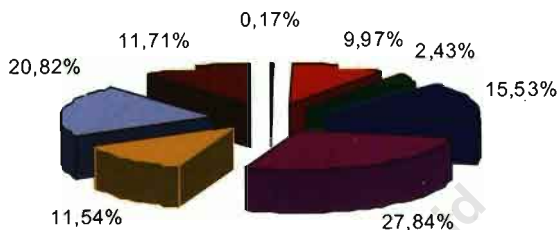
Sektor selanjutnya yang peranannya juga signifikan terhadap pembentukan PDRB adalah Sektor bangunan. Peranan sektor ini masih cukup tinggi sepanjang periode tersebut, yaitu masih diatas 15 persen. Pada tahun 2000 peranan sektor ini terhadap PDRB Jakarta Barat adalah 15,81 persen, kemudian terus meningkat menjadi 15,99 persen tahun 2001 dan 16,04 persen tahun 2002, walaupun sedikit menurun menjadi 15,53 persen tahun 2003.

Sektor-sektor lain yang peranannya menurun pada tahun 2003 adalah Sektor Pertanian, Sektor Industri Pengolahan, dan Sektor Jasa-jasa. Peranan sektor Pertanian sedikit menurun dari tahun sebelumnya 0,18 persen tahun 2002 menjadi 0,17 persen pada tahun 2003. Sedang peranan Sektor Industri Pengolahan menurun dari 10,45 persen pada tahun 2002 menjadi 9,97 persen pada tahun 2003.

Sedangkan sektor-sektor lain yang peranannya menguat adalah sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Peranan sektor Listrik, Gas dan Air Bersih meningkat dari 2,37 persen tahun 2002 menjadi 2,43 persen pada tahun 2003. Walaupun sektor ini bersama-sama dengan sektor pertanian peranannya relatif cukup kecil dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain namun peranan sektor ini sangat penting dalam menunjang aktivitas perekonomian di Jakarta Barat.

Peranan sektor Pengangkutan dan Komunikasi mempunyai kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, dari 8.90 persen tahun 2000 menjadi 11,54 persen di tahun 2003. Kecenderungan ini terutama dipengaruhi oleh subsektor komunikasi yang tumbuh diatas 8 persen. Hal ini merupakan indikasi bahwa sektor ini akan memiliki peran yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan semakin membudayanya penggunaan telepon genggam.

Gambar 2. Distribusi Persentase PDRB Jakarta Barat, 2003



- Pertanian
- Industri Pengolahan
- Listrik, Gas dan Air Minum
- Bangunan
- Perdagangan, Hotel dan Restoran
- Pengangkutan dan Komunikasi
- Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- Jasa-jasa

3.3 PDRB PERKAPITA

PDRB perkapita mencerminkan tentang besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di suatu wilayah setelah dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Besarnya jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap nilai PDRB perkapita. Adapun jumlah penduduk Jakarta Barat tahun 2003 ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk hasil SP2000 yang digerakkan dengan perkiraan jumlah kelahiran, kematian dan migrasi pada tahun yang bersangkutan.

Dari Tabel 3.3 terlihat bahwa PDRB perkapita Jakarta Barat terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dari 15,68 juta rupiah pada tahun 2000 menjadi 23,32 juta rupiah pada tahun 2003 atau secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 14 persen pertahun selama kurun waktu tersebut. Demikian juga secara riil (berdasarkan atas dasar harga konstan 1993) PDRB perkapita Jakarta Barat juga menunjukkan peningkatan yang berarti dari 5,02 juta rupiah pada tahun 2000 menjadi 5,43 juta rupiah pada tahun 2003

atau secara rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2,68 persen pertahun selama kurun 2000-2003.

Tabel 3.3 PDRB Perkapita Jakarta Barat, 2000-2003

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2000	15.682.431	5.015.294
2001	18.644.173	5.112.276
2002	21.207.523	5.274.375
2003	23.323.441	5.429.739

Peningkatan PDRB perkapita riil secara bertahap sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 ini terutama disebabkan oleh kembali bergairahnya kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Walaupun demikian, PDRB perkapita riil tahun 2003 masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 1997 yang mencapai 6,19 juta. Hal ini dapat dimengerti karena diperlukan waktu yang lama untuk dapat memulihkan keadaan perekonomian pasca krisis ekonomi dan instabilitas politik sejak terjadinya suksesi nasional pada tahun 1998.

BAB IV

PERBANDINGAN PDRB ANTAR WILAYAH

Berhasilnya pembangunan ekonomi DKI Jakarta merupakan refleksi dari keberhasilan pembangunan ekonomi di masing-masing wilayah kotamadya. Dengan demikian, tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan gambaran tentang peranan kinerja ekonomi Jakarta Barat dalam perekonomian DKI Jakarta, maka dalam sub bab ini dibahas secara khusus mengenai perbandingan PDRB antar wilayah dengan menampilkan ukuran-ukuran berupa laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi PDRB dan PDRB perkapita.

4.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya

digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian tersebut secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala.

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kotamadya di lingkungan propinsi DKI Jakarta selama periode 2000-2003 menunjukkan keadaan yang bervariasi, yaitu ada yang di bawah dan di atas laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.

Tahun 2000 merupakan titik tolak pemulihan ekonomi DKI Jakarta, hal ini karena sejak tahun tersebut laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mulai menunjukkan perbaikan dimana kontraksi pertumbuhan

ekonomi, yang pada tahun 1999 sebesar 0,29 persen, sudah dapat diperbaiki hingga mencapai 4,33 persen. Pada tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi menjadi sedikit lebih lambat menjadi 3,99 persen, namun pada tahun 2002 meningkat menjadi 3,87 persen, dan kondisi ini semakin membaik pada tahun 2003 dengan laju pertumbuhan mencapai 4,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian DKI Jakarta sudah mulai menunjukkan pola yang stabil dan membaik.

Pola yang sama terjadi seluruh wilayah Kotamadya dimana⁶ pada tahun 2001 terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun 2000, namun kemudian tumbuh semakin cepat pada tahun tahun berikutnya.

Selama periode 2000-2003, hanya Kotamadya Jakarta Pusat yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding-kan dengan DKI Jakarta.

Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kotamadya di DKI Jakarta, 2000-2003

Kotamadya	2000	2001	2002	2003
Jakarta Selatan	3,59	3,58	3,77	4,34
Jakarta Timur	3,72	3,22	3,59	4,23
Jakarta Pusat	4,39	3,95	3,99	4,43
Jakarta Barat	4,13	3,92	3,98	4,37
Jakarta Utara	3,42	3,25	3,55	4,17
Pulau Seribu	-	-	-6,91	-2,39
DKI Jakarta	4,33	3,64	3,99	4,39

Walaupun demikian jika dibandingkan antar wilayah, pada tahun 2003, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Barat (4,37 persen) masih lebih tinggi dibandingkan dengan kotamadya lainnya, meskipun masih berada di bawah Jakarta Pusat (4,43 persen). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, setelah tahun 2000 laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Barat cenderung lebih cepat, dari 4,13 persen pada tahun 2000 menjadi 4,37 persen pada tahun 2003. Kecenderungan yang sama juga terjadi di seluruh wilayah kotamadya di DKI Jakarta.

Sejak tahun 2002 Kepulauan Seribu sudah menjadi wilayah Kabupaten sendiri dan terpisah dengan Kotamadya Jakarta Utara, walau laju pertumbuhan ekonominya masih negatif, namun menunjukkan arah perbaikan di masa yang akan datang, karena kontraksi pertumbuhan ekonominya makin mengecil dari -6,91 persen pada tahun 2002 menjadi -2,39 persen pada tahun 2003.

4.2 KONTRIBUSI PDRB.

Sumbangan masing-masing wilayah terhadap pembentukan PDRB DKI Jakarta disajikan pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa mulai tahun 2001, Jakarta Barat sudah tidak lagi memiliki peran yang terkecil dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Sejak tahun tersebut peran yang terkecil diberikan oleh Jakarta Selatan. Selama periode 2000-2003, peran yang terbesar dimiliki oleh Jakarta Pusat, diikuti oleh Jakarta Utara, dan Jakarta Timur. Pada tahun 2003, peran Jakarta Barat dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta

adalah 17,48 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Jakarta Selatan yang sebesar 17,34 persen. Sedangkan Jakarta Pusat yang memiliki peran yang tertinggi besarnya adalah sebesar 25,08 persen.

Tabel 4.2 Kontribusi PDRB Menurut Kotamadya di DKI Jakarta, 2000-2003

Kotamadya	2000	2001	2002	2003
Jakarta Selatan	17,58	17,39	17,20	17,34
Jakarta Timur	19,71	19,49	19,54	19,19
Jakarta Pusat	25,39	25,04	24,95	25,08
Jakarta Barat	16,83	17,55	17,38	17,48
Jakarta Utara	20,49	20,53	20,31	20,35
Pulau Seribu	-	-	0,63	0,56
DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00	100,00

Jika peran PDRB Jakarta Barat dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta dirinci menurut sektor, seperti tersaji pada Tabel 4.3, pada tahun 2003 Jakarta Barat agak dominan pada sektor-sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan

dan komunikasi, dan sektor Jasa-jasa. Peranan sektor-sektor tersebut terhadap sektor yang bersangkutan dalam PDRB DKI Jakarta pada tahun 2003 masing-masing adalah 23,18 persen, 24,68 persen, 19,90 persen, 25,05 persen, 20,70 persen.

Peranan sektor Listrik Gas dan Air bersih, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi terhadap sektor yang sama dalam PDRB DKI Jakarta merupakan yang kedua terbesar dibandingkan dengan Kotamadya lainnya, sedangkan untuk sektor-sektor lainnya, Jakarta Barat tidak pernah memiliki peran yang terkecil dibandingkan dengan kotamadya lainnya.

Seperti terlihat pada Tabel 4.3, jika dibandingkan peran antar wilayah terhadap PDRB DKI Jakarta, untuk sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, peran yang terbesar diberikan oleh Jakarta Pusat, kemudian berturut-turut diikuti oleh Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Selain sektor Keuangan Jakarta Pusat

juga merupakan wilayah konsentrasi untuk sektor-sektor perdagangan, hotel dan restoran (31,86 persen), listrik, gas dan air bersih (28,83 persen), dan sektor jasa-jasa (26,85 persen).

Tabel 4.3 Kontribusi PDRB Sektoral Menurut Kotamadya di DKI Jakarta, 2003

Sektor	Jaksel	Jaktim	Jakpus	Jakbar	Jakut	Pulau Seribu	DKI
1. Pertanian	18,04	15,84	2,86	15,18	32,24	15,80	100,00
2. Pertambangan & Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3. Industri Pengolahan	5,59	30,55	2,33	8,23	53,29	0,01	100,00
4. Listrik, Gas & Air Bersih	13,27	20,32	28,83	23,18	13,76	0,64	100,00
5. Bangunan	26,46	24,83	10,82	24,68	13,16	0,04	100,00
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,07	16,27	31,86	19,90	13,80	0,09	100,00
7. Pengangkutan & Komunikasi	14,37	16,66	14,94	25,05	28,89	0,10	100,00
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perush.	21,04	10,19	79,33	15,74	3,69	0,00	100,00
9. Jasa-jasa	26,11	19,19	26,85	20,70	7,02	0,14	100,00
PDRB	17,34	19,19	25,08	17,48	20,35	0,56	100,00

Jakarta Utara merupakan wilayah konsentrasi untuk sektor Industri Pengolahan (53,29 persen), sektor Pertanian (32,24 persen), dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi (28,89 persen). Sementara sektor Bangunan terkonsentrasi di Jakarta Selatan (26,46 persen).

4.3 PDRB PERKAPITA

Secara umum, PDRB perkapita DKI Jakarta berada diatas PDRB perkapita yang dicapai masing-masing kotamadya, kecuali Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Dari Tabel 4.4 ditunjukkan bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan dari 22,42 juta rupiah pada pada tahun 2000 menjadi 32,71 juta rupiah pada tahun 2003.

Begitu pula melalui penghitungan secara riil (atas dasar harga konstan 1993) PDRB Perkapita DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari 7,09 juta rupiah pada tahun 2000 menjadi 7,74 juta rupiah pada tahun 2003. Trend peningkatan PDRB

perkapita juga dirasakan di lima wilayah kotamadya lainnya.

PDRB perkapita Jakarta Pusat dari tahun ke tahun terus melesat jauh melebihi PDRB perkapita DKI Jakarta dan wilayah kotamadya lainnya. Pada tahun 2000 PDRB perkapita Jakarta Pusat sebesar 52,14 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 74,24 juta rupiah pada tahun 2003. Begitu juga secara riil, mengalami peningkatan dari 17,13 juta rupiah pada tahun 2000 menjadi 18,55 pada tahun 2003.

Sementara itu, sejak tahun 2000, PDRB perkapita yang dicapai Jakarta Barat hanya menduduki peringkat ke empat sebelum Jakarta Timur. PDRB perkapita Jakarta Barat adalah 15,68 juta rupiah pada tahun 2000, kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai akhirnya menjadi 23,32 juta rupiah pada tahun 2003. Secara riil, PDRB perkapita Jakarta Barat juga mengalami peningkatan dari 5,01 juta rupiah pada tahun 2000 menjadi 5,43 juta rupiah pada tahun 2003.

Tabel 4.4 PDRB Perkapita Menurut Kotamadya di DKI Jakarta, 2000-2003 (ribu rupiah)

Kotamadya	2000	2001	2002	2003
A. A.D.H. Berlaku				
Jakarta Selatan	17.464	19.880	22.003	24.794
Jakarta Timur	14.941	16.913	19.359	20.964
Jakarta Pusat	52.142	59.217	70.388	74.244
Jakarta Barat	15.682	18.644	21.018	23.323
Jakarta Utara	25.318	29.765	33.887	37.483
DKI Jakarta	22.425	26.211	30.191	32.709
B. A.D.H. Konstan 1993				
Jakarta Selatan	6.044	6.199	6.217	6529
Jakarta Timur	4.899	4.980	4.980	5.224
Jakarta Pusat	17.138	17.502	18.000	18.546
Jakarta Barat	5.015	5.112	5.264	5.430
Jakarta Utara	9.109	9.376	9.789	10.148
DKI Jakarta	7.095	7.375	7.661	7.736

TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

N0.	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002*)	2003**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	56.572	67.549	75.575	79.195
	a. Tanaman Bahan Makanan	43.714	52.901	58.918	60.946
	b. Tanaman Hias	8.628	9.655	10.634	11.330
	c. Peternakan	1.231	1.796	2.205	2.498
	d. Perikanan	2.999	3.198	3.818	4.421
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	3.579.273	3.961.633	4.319.397	4.625.487
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	597.537	641.211	683.619	728.512
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	844.639	957.159	1.044.512	1.089.629
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	174.089	187.514	206.047	217.812
	4) Kertas dan Barang Cetak	76.896	81.011	89.499	98.446
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	656.389	719.967	775.395	838.083
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	274.801	342.193	409.681	488.428
	7) Logam Dasar Besi & Baja	446.819	465.852	487.345	509.273
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	481.572	533.249	584.772	610.726
	9) Barang lainnya	26.531	33.479	38.527	44.578
3	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	563.833	771.078	924.031	1.127.655
	a. Listrik	232.426	340.835	433.993	554.013
	b. Gas	222.103	303.939	336.673	386.005
	c. Air Bersih	109.304	126.304	153.365	187.636
4	BANGUNAN	4.738.868	5.806.157	6.631.001	7.207.641
5	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORA	8.179.296	9.965.066	11.541.613	12.921.115
	a. Perdagangan	7.134.519	8.698.448	10.052.797	11.175.081
	b. Hotel	131.013	149.816	172.184	197.770
	c. Restoran	913.764	1.116.802	1.316.633	1.548.264
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2.666.439	3.688.743	4.481.554	5.356.995
	a. Pengangkutan	1.492.448	2.168.093	2.661.855	3.137.955
	1) Angkutan Rel	86.498	101.053	124.713	140.959
	2) Angkutan Jalan Raya	1.014.379	1.513.019	1.851.043	2.166.598
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angkutan Udara	-	-	-	-
	5) Jasa Penunjang Angkutan	391.571	554.021	686.099	830.398
	b. Komunikasi	1.173.991	1.520.651	1.819.699	2.219.040
7	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	6.504.063	7.646.164	8.834.577	9.662.359
	a. Bank	3.736.513	4.572.307	5.393.913	5.799.255
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	474.030	581.237	672.550	789.665
	c. Sewa Bangunan	1.397.677	1.449.686	1.614.080	1.790.499
	d. Jasa Perusahaan	895.843	1.042.934	1.154.034	1.282.940
8	JASA - JASA	3.672.470	4.405.468	4.820.498	5.433.201
	a. Pemerintahan Umum	1.096.827	1.453.241	1.629.374	1.808.452
	b. Swasta	2.575.643	2.952.227	3.191.124	3.624.749
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	486.207	590.322	683.173	817.170
	2) Hiburan dan Rekreasi	202.602	266.323	293.994	354.304
	3) Perorangan dan Rumahtangga	1.886.834	2.095.582	2.213.957	2.453.275
Produk Domestik Regional Bruto		29.960.814	36.311.859	41.628.247	46.413.648

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993, MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

NO.	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002*)	2003**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	12.880	14.192	14.177	13.722
	a. Tanaman Bahan Makanan	9.781	10.898	10.761	10.181
	b. Tanaman Hias	2.329	2.417	2.511	2.595
	c. Peternakan	314	419	436	453
	d. Perikanan	456	459	470	493
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	1.077.628	1.123.82^a	1.175.029	1.224.797
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	196.303	201.470	206.018	210.653
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	261.396	280.804	294.168	308.318
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	50.457	53.068	52.241	53.699
	4) Kertas dan Barang Cetak	25.142	26.085	27.299	28.656
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	202.468	213.753	225.632	239.960
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	79.070	78.920	84.339	90.183
	7) Logam Dasar Besi & Baja	110.979	108.347	110.582	113.844
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	143.197	152.381	165.123	169.220
	9) Barang lainnya	8.616	9.002	9.627	10.264
3	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	232.665	244.528	257.853	273.184
	a. Listrik	107.247	113.077	117.933	125.811
	b. Gas	85.953	89.126	91.416	93.924
	c. Air Bersih	39.465	42.325	48.504	53.449
4	BANGUNAN	1.565.417	1.601.303	1.642.907	1.686.544
5	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORA	2.773.739	2.867.070	2.974.461	3.132.668
	a. Perdagangan	2.418.663	2.498.214	2.590.648	2.728.729
	b. Hotel	47.714	50.932	51.614	54.133
	c. Restoran	307.362	317.924	332.199	349.805
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	1.128.946	1.200.723	1.270.448	1.345.351
	a. Pengangkutan	701.387	737.398	767.644	801.569
	1) Angkutan Rel	31.502	33.527	33.561	33.867
	2) Angkutan Jalan Raya	470.644	497.432	518.324	542.472
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angkutan Udara	-	-	-	-
	5) Jasa Penunjang Angkutan	199.241	207.439	215.758	225.230
	b. Komunikasi	427.559	463.325	502.804	543.783
7	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	1.649.210	1.722.404	1.797.633	1.858.312
	a. Bank	676.763	719.825	764.056	776.586
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	155.157	161.203	168.666	189.901
	c. Sewa Bangunan	509.024	519.025	531.944	547.105
	d. Jasa Perusahaan	308.266	322.351	332.966	344.720
8	JASA - JASA	1.141.083	1.182.747	1.220.564	1.270.603
	a. Pemerintahan Umum	276.558	287.199	292.662	298.983
	b. Swasta	864.525	895.548	927.902	971.619
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	179.048	184.317	190.036	198.853
	2) Hiburan dan Rekreasi	78.619	85.240	92.346	100.973
	3) Perorangan dan Rumah tangga	606.858	625.992	645.521	671.793
Produk Domestik Regional Bruto		9.581.568	9.956.796	10.353.072	10.805.181

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

TABEL 3. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

NO.	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002*)	2003**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	116,13	119,40	111,88	104,79
	a. Tanaman Bahan Makanan	117,41	121,02	111,38	103,44
	b. Tanaman Hias	103,85	111,90	110,14	106,55
	c. Peternakan	131,24	145,87	122,79	113,31
	d. Perikanan	134,06	106,64	119,39	115,80
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	111,86	110,68	109,03	107,09
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	111,87	107,31	106,61	106,57
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	114,32	113,32	109,13	104,32
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	110,50	107,71	109,88	105,71
	4) Kertas dan Barang Cetakan	114,38	105,35	110,48	110,00
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	111,88	109,69	107,70	108,08
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	110,53	124,52	119,72	119,22
	7) Logam Dasar Besi & Baja	105,13	104,26	104,61	104,50
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	115,05	110,73	109,66	104,44
	9) Barang lainnya	114,26	126,19	115,08	115,71
3	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	122,24	136,76	119,84	122,04
	a. Listrik	126,08	146,64	127,33	127,65
	b. Gas	121,32	136,85	110,77	114,65
	c. Air Bersih	116,50	115,55	121,43	122,35
4	BANGUNAN	113,98	122,52	114,21	108,70
5	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORA	114,07	121,83	115,82	111,95
	a. Perdagangan	112,94	121,92	115,57	111,16
	b. Hotel	107,32	114,35	114,93	114,86
	c. Restoran	124,98	122,22	117,89	117,59
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	121,60	138,34	121,49	119,53
	a. Pengangkutan	119,42	145,27	122,77	117,89
	1) Angkutan Rel	121,41	116,83	123,41	113,03
	2) Angkutan Jalan Raya	115,56	149,16	122,34	117,05
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angkutan Udara	-	-	-	-
	5) Jasa Penunjang Angkutan	130,19	141,49	123,84	121,03
	b. Komunikasi	124,49	129,53	119,67	121,95
7	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	114,78	117,56	115,54	109,37
	a. Bank	114,77	122,37	117,97	107,51
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	121,58	122,62	115,71	117,41
	c. Sewa Bangunan	113,37	103,72	111,34	110,93
	d. Jasa Perusahaan	113,64	116,42	110,65	111,17
8	JASA - JASA	113,76	119,96	109,42	112,71
	a. Pemerintahan Umum	117,80	132,50	112,12	110,99
	b. Swasta	112,13	114,62	108,09	113,59
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	118,83	121,41	115,73	119,61
	2) Hiburan dan Rekreasi	120,88	131,45	110,39	120,51
	3) Perorangan dan Rumah tangga	109,68	111,06	105,65	110,81
Produk Domestik Regional Bruto		114,68	121,20	114,64	111,50

*) Angka perbalkan

**) Angka sementara

TABEL 4. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA

NO.	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002*)	2003**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	96,54	110,19	99,90	96,79
	a. Tanaman Bahan Makanan	96,99	111,42	98,75	94,60
	b. Tanaman Hias	91,87	103,77	103,89	103,36
	c. Peternakan	111,35	133,28	104,12	103,88
	d. Perikanan	103,64	100,70	102,24	105,02
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	105,49	104,29	104,56	104,24
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	104,34	102,63	102,26	102,25
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	108,66	107,42	104,76	104,81
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	108,49	105,17	98,44	102,79
	4) Kertas dan Barang Cetakan	104,96	103,75	104,66	104,97
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	106,46	105,57	105,56	106,35
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	98,36	99,81	106,87	106,93
	7) Logam Dasar Besi & Baja	99,55	97,63	102,06	102,95
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	108,20	106,41	108,36	102,48
	9) Barang lainnya	107,61	104,48	106,94	106,62
3	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	106,97	105,10	105,45	105,95
	a. Listrik	106,87	105,44	104,29	106,68
	b. Gas	107,21	103,69	102,57	102,74
	c. Air Bersih	106,73	107,25	114,60	110,19
4	BANGUNAN	103,12	102,29	102,60	102,66
5	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORA	105,06	103,36	103,75	105,32
	a. Perdagangan	105,21	103,29	103,70	105,33
	b. Hotel	103,42	106,74	101,34	104,88
	c. Restoran	104,15	103,44	104,49	105,30
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	105,74	106,36	105,81	105,90
	a. Pengangkutan	104,83	105,13	104,10	104,42
	1) Angkutan Rel	104,16	106,43	103,18	100,91
	2) Angkutan Jalan Raya	105,24	105,69	104,20	104,66
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angkutan Udara	-	-	-	-
	5) Jasa Penunjang Angkutan	103,98	104,11	104,01	104,39
	b. Komunikasi	107,26	108,37	108,52	108,15
7	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	101,77	104,44	104,37	103,38
	a. Bank	101,24	106,36	106,14	101,64
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	102,28	103,90	104,63	112,59
	c. Sewa Bangunan	101,25	101,96	102,49	102,85
	d. Jasa Perusahaan	103,60	104,57	103,29	103,53
8	JASA - JASA	103,44	103,65	103,20	104,10
	a. Pemerintahan Umum	101,67	103,85	101,90	102,16
	b. Swasta	104,03	103,59	103,61	104,71
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	101,33	102,94	103,10	104,64
	2) Hiburan dan Rekreasi	106,24	108,42	108,34	109,34
	3) Perorangan dan Rumahtangga	104,56	103,15	103,12	104,07
Produk Domestik Regional Bruto		104,13	103,92	103,98	104,37

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

TABEL 5. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

NO.	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002*)	2003**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	392,37	468,50	524,17	538,95
	a. Tanaman Bahan Makanan	425,19	514,55	573,08	590,67
	b. Tanaman Hias	277,25	310,24	341,70	368,18
	c. Peternakan	275,39	401,70	493,26	548,24
	d. Perikanan	518,86	553,29	660,57	525,42
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	491,49	543,99	593,12	586,89
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	1.033,01	1.108,52	1181,83	1133,60
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	499,90	566,50	618,20	612,78
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	468,12	504,22	554,05	540,06
	4) Kertas dan Barang Cetak	549,65	579,06	639,74	589,24
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	435,38	477,55	514,31	504,21
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	292,12	363,76	435,51	490,66
	7) Logam Dasar Besi & Baja	1.029,42	1.073,27	1122,79	1113,53
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	308,68	341,81	374,83	360,77
	9) Barang lainnya	440,64	556,04	639,87	706,68
3	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	339,24	463,93	589,01	658,95
	a. Listrik	225,68	330,94	427,39	497,08
	b. Gas	613,29	839,26	1102,00	1243,06
	c. Air Bersih	404,83	467,79	517,44	513,24
4	BANGUNAN	291,51	357,16	407,90	438,46
5	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORA	384,66	468,64	521,71	557,22
	a. Perdagangan	382,75	466,65	516,00	557,04
	b. Hotel	418,48	478,54	506,90	540,13
	c. Restoran	395,44	483,30	569,78	557,20
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	297,54	411,61	506,90	576,68
	a. Pengangkutan	271,02	393,71	494,47	601,53
	1) Angkutan Rel	370,27	432,57	533,85	513,72
	2) Angkutan Jalan Raya	247,43	369,07	463,71	598,52
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angkutan Udara	-	-	-	-
	5) Jasa Penunjang Angkutan	333,66	472,09	594,08	645,62
	b. Komunikasi	339,80	440,14	526,69	548,00
7	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	322,72	379,39	434,04	444,55
	a. Bank	313,60	383,75	452,71	482,67
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	227,94	279,49	323,40	326,14
	c. Sewa Bangunan	316,51	328,29	345,81	316,39
	d. Jasa Perusahaan	513,77	598,13	661,84	678,01
8	JASA - JASA	345,29	414,21	464,86	490,19
	a. Pemerintahan Umum	286,65	379,80	448,41	504,36
	b. Swasta	378,24	433,55	474,11	484,66
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	310,31	376,75	436,01	445,51
	2) Hiburan dan Rekreasi	291,41	383,06	476,51	518,20
	3) Perorangan dan Rumah tangga	414,93	460,83	486,87	493,01
Produk Domestik Regional Bruto		346,93	420,47	482,03	509,42

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

TABEL 6. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA

NO.	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002*)	2003**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	89,33	98,43	98,33	95,17
	a. Tanaman Bahan Makanan	95,14	106,00	104,67	99,02
	b. Tanaman Hias	74,84	77,66	80,69	83,40
	c. Peternakan	70,25	93,62	97,48	101,26
	d. Perikanan	78,89	79,45	81,23	85,31
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	147,97	154,32	161,35	168,18
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	339,37	348,30	356,16	364,17
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	154,71	166,20	174,11	182,48
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	135,68	142,70	140,48	144,39
	4) Kertas dan Barang Cetak	179,71	186,45	195,13	204,83
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	134,29	141,78	149,66	159,16
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	84,05	83,89	89,66	95,87
	7) Logam Dasar Besi & Baja	255,68	249,62	254,77	262,28
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	91,79	97,67	105,84	108,47
	9) Barang lainnya	143,10	149,51	159,89	170,47
3	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	139,99	147,12	155,14	164,36
	a. Listrik	104,13	109,79	114,51	122,16
	b. Gas	237,34	246,10	252,43	259,35
	c. Air Bersih	146,17	156,76	179,64	197,96
4	BANGUNAN	96,30	98,50	101,06	103,75
5	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORA	130,44	134,83	139,88	147,32
	a. Perdagangan	129,76	134,02	138,98	146,39
	b. Hotel	152,41	162,68	164,86	172,91
	c. Restoran	133,01	137,58	143,76	151,38
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	125,97	133,98	141,76	150,12
	a. Pengangkutan	127,37	133,91	139,40	145,56
	1) Angkutan Rel	134,85	143,51	143,66	144,97
	2) Angkutan Jalan Raya	114,80	121,34	126,43	132,32
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angkutan Udara	-	-	-	-
	5) Jasa Penunjang Angkutan	169,77	176,76	183,85	191,92
	b. Komunikasi	123,75	134,11	145,53	157,39
7	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	81,83	85,46	89,19	92,21
	a. Bank	56,80	60,41	64,13	65,18
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	74,61	77,51	81,10	91,31
	c. Sewa Bangunan	115,27	117,54	120,46	123,89
	d. Jasa Perusahaan	176,79	184,87	190,96	197,70
8	JASA - JASA	107,29	111,20	114,76	119,46
	a. Pemerintahan Umum	72,28	75,06	76,49	78,14
	b. Swasta	126,96	131,51	136,27	142,69
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	114,27	117,63	121,28	126,91
	2) Hiburan dan Rekreasi	113,08	122,60	132,82	145,23
	3) Perorangan dan Rumah tangga	133,45	137,66	141,95	147,73
Produk Domestik Regional Bruto		110,95	115,29	119,88	125,12

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

TABEL 7. INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA

NO.	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002*)	2003**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	439,22	475,96	533,07	577,16
	a. Tanaman Bahan Makanan	446,93	485,43	547,51	598,65
	b. Tanaman Hias	370,46	399,47	423,49	436,55
	c. Peternakan	392,04	429,06	506,00	551,95
	d. Perikanan	657,68	696,43	813,21	896,64
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	332,14	352,51	367,60	377,65
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	304,40	318,27	331,82	345,83
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	323,13	340,86	355,07	353,41
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	345,02	353,35	394,41	405,62
	4) Kertas dan Barang Cetak	305,85	310,57	327,85	343,55
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	324,19	336,82	343,65	349,26
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	347,54	433,60	485,76	541,59
	7) Logam Dasar Besi & Baja	402,62	429,96	440,71	447,34
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	336,30	349,94	354,14	360,91
	9) Barang lainnya	307,93	371,91	400,20	434,31
3	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	242,34	315,33	358,36	412,78
	a. Listrik	216,72	301,42	368,00	440,35
	b. Gas	258,40	341,02	368,29	410,97
	c. Air Bersih	276,96	298,42	316,19	351,06
4	BANGUNAN	302,72	362,59	403,61	427,36
5	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORA	294,88	347,57	388,02	412,46
	a. Perdagangan	294,98	348,19	388,04	409,53
	b. Hotel	274,58	294,15	333,60	365,34
	c. Restoran	297,29	351,28	396,34	442,61
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	236,19	307,21	352,75	398,19
	a. Pengangkutan	212,79	294,02	346,76	391,48
	1) Angkutan Rel	274,58	301,41	371,60	416,22
	2) Angkutan Jalan Raya	215,53	304,17	357,12	399,39
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angkutan Udara	-	-	-	-
	5) Jasa Penunjang Angkutan	196,53	267,08	317,99	368,69
	b. Komunikasi	274,58	328,20	361,91	408,07
7	KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN JASA PERUSAHAAN	394,37	443,92	491,46	519,95
	a. Bank	552,12	635,20	705,96	746,76
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	305,52	360,56	398,75	415,83
	Jasa Penunjang Keuangan	274,58	279,31	303,43	327,27
	c. Sewa Bangunan	290,61	323,54	346,59	372,17
	d. Jasa Perusahaan	290,61	323,54	346,59	372,17
8	JASA - JASA	321,84	372,48	394,94	427,61
	a. Pemerintahan Umum	396,60	506,01	556,74	604,87
	b. Swasta	297,93	329,66	343,91	373,06
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	271,55	320,28	359,50	410,94
	2) Hiburan dan Rekreasi	257,70	312,44	318,36	350,89
	3) Perorangan dan Rumahtangga	310,92	334,76	342,97	365,18
Produk Domestik Regional Bruto		312,69	364,69	402,09	429,55

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

TABEL 8. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA

NO.	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002*)	2003**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANILAN	0,19	0,19	0,18	0,17
a.	Tanaman Bahan Makanan	0,15	0,15	0,14	0,13
b.	Tanaman Hias	0,03	0,03	0,03	0,02
c.	Peternakan	0,00	0,00	0,01	0,01
d.	Perikanan	0,01	0,01	0,01	0,01
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	11,95	10,91	10,38	9,97
1)	Makanan, Minuman & Tembakau	1,99	1,77	1,64	1,57
2)	Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	2,82	2,64	2,51	2,35
3)	Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	0,58	0,52	0,49	0,47
4)	Kertas dan Barang Cetak	0,26	0,22	0,21	0,21
5)	Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	2,19	1,98	1,86	1,81
6)	Semen dan Barang Galian bukan logam	0,92	0,94	0,98	1,05
7)	Logam Dasar Besi & Baja	1,49	1,28	1,17	1,10
8)	Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	1,61	1,47	1,40	1,32
9)	Barang lainnya	0,09	0,09	0,09	0,10
3	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	1,88	2,12	2,22	2,43
a.	Listrik	0,78	0,94	1,04	1,19
b.	Gas	0,74	0,84	0,81	0,83
c.	Air Bersih	0,36	0,35	0,37	0,40
4	BANGUNAN	15,82	15,99	15,93	15,53
5	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORA	27,30	27,44	27,73	27,84
a.	Perdagangan	23,81	23,95	24,15	24,08
b.	Hotel	0,44	0,41	0,41	0,43
c.	Restoran	3,05	3,08	3,16	3,34
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	8,90	10,16	10,77	11,54
a.	Pengangkutan	4,98	5,97	6,39	6,76
1)	Angkutan Rel	0,29	0,28	0,30	0,30
2)	Angkutan Jalan Raya	3,39	4,17	4,45	4,67
3)	Angkutan Laut	-	-	-	-
4)	Angkutan Udara	-	-	-	-
5)	Jasa Penunjang Angkutan	1,31	1,53	1,65	1,79
b.	Komunikasi	3,92	4,19	4,37	4,78
7	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	21,71	21,06	21,22	20,82
a.	Bank	12,47	12,59	12,96	12,49
b.	Lembaga Keuangan tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	1,58	1,60	1,62	1,70
c.	Sewa Bangunan	0,00	3,99	3,88	3,86
d.	Jasa Perusahaan	4,67	2,87	2,77	2,76
8	JASA - JASA	12,26	12,13	11,58	11,71
a.	Pemerintahan Umum	3,66	4,00	3,91	3,90
b.	Swasta	8,60	8,13	7,67	7,81
1)	Sosial dan Kemasyarakatan	1,62	1,63	1,64	1,76
2)	Hiburan dan Rekreasi	0,68	0,73	0,71	0,76
3)	Perorangan dan Rumah tangga	6,30	5,77	5,32	5,29
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

TABEL 9. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONTAN 1993 MENURUT LAPANGAN USAHA

NO.	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002*)	2003**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	0,13	0,14	0,14	0,13
	a. Tanaman Bahan Makanan	0,10	0,11	0,10	0,09
	b. Tanaman Hias	0,02	0,02	0,02	0,02
	c. Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	11,25	11,29	11,35	11,34
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	2,05	2,02	1,99	1,95
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	2,73	2,82	2,84	2,85
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	0,53	0,53	0,50	0,50
	4) Kertas dan Barang Cetakan	0,26	0,26	0,26	0,27
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	2,11	2,15	2,18	2,22
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	0,83	0,79	0,81	0,83
	7) Logam Dasar Besi & Baja	1,16	1,09	1,07	1,05
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	1,49	1,53	1,59	1,57
	9) Barang lainnya	0,09	0,09	0,09	0,09
3	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	2,43	2,46	2,49	2,53
	a. Listrik	1,12	1,14	1,14	1,16
	b. Gas	0,90	0,90	0,88	0,87
	c. Air Bersih	0,41	0,43	0,47	0,49
4	BANGUNAN	16,34	16,08	15,87	15,61
5	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORA	28,95	28,80	28,73	28,99
	a. Perdagangan	25,24	25,09	25,02	25,25
	b. Hotel	0,50	0,51	0,50	0,50
	c. Restoran	3,21	3,19	3,21	3,24
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	11,78	12,06	12,27	12,45
	a. Pengangkutan	7,32	7,41	7,41	7,42
	1) Angkutan Rel	0,33	0,34	0,32	0,31
	2) Angkutan Jalan Raya	4,91	5,00	5,01	5,02
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angkutan Udara	-	-	-	-
	5) Jasa Penunjang Angkutan	2,08	2,08	2,08	2,08
	b. Komunikasi	4,46	4,65	4,86	5,03
7	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	17,21	17,30	17,36	17,20
	a. Bank	7,06	7,23	7,38	7,19
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan Jasa Penunjang Keuangan	1,62	1,62	1,63	1,76
	c. Sewa Bangunan	5,31	5,21	5,14	5,06
	d. Jasa Perusahaan	3,22	3,24	3,22	3,19
8	JASA - JASA	11,91	11,88	11,79	11,76
	a. Pemerintahan Umum	2,89	2,88	2,83	2,77
	b. Swasta	9,02	8,99	8,96	8,99
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	1,87	1,85	1,84	1,84
	2) Hiburan dan Rekreasi	0,82	0,86	0,89	0,93
	3) Perorangan dan Rumah tangga	6,33	6,29	6,24	6,22
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka perbaikan
**) Angka sementara

TABEL 10. AGREGAT PENDAPATAN DAN PENDAPATAN PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN 1993

NO.	LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002*)	2003**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
1.	Produk Domestik Regional Bruto Harga Pasar (Juta Rupiah)	29.960.814	36.311.859	41.628.247	46.416.397
2.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rupiah)	15.682.431	18.644.173	21.018.820	23.323.441
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993					
1.	Produk Domestik Regional Bruto Harga Pasar (Juta Rupiah)	9.581.568	9.956.796	10.353.072	10.805.452
2.	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Rupiah)	5.015.294	5.112.276	5.264.080	5.429.739
	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Orang)	1.910.470	1.947.625	1.962.900	1.990.000

*) Angka perbaikan

***) Angka sementara

<https://jakbar.kota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTAMADYA JAKARTA BARAT
JL. KELAPA DUA RAYA NO. 10 JAKARTA 11550
TELP./FAX : 5364630/43679176